

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awalnya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikan dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah-maalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Namun kenyataan tidak demikian. Hal ini terjadi karena angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan nasional (*Gross National Product*) atau produk domestik bruto kurang peka dalam mengungkapkan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Apalagi ditambah kenyataan bahwa jurang perbedaan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut ( Arsyad, 2010).

Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia, perlu di perhatikan lokalitas yang ada di masing-masing daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang di tentukan oleh komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecah masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih objektif dan tepat sasaran. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mencatat prestasi membanggakan dalam memberantas kemiskinan selama periode 1976 sampai awal krisis ekonomi 1997. Pada tahun 1976 jumlah orang miskin mencapai 54,2

juta jiwa atau 40,1% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2004 jumlah orang miskin sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari jumlah penduduk (BPS, 2005).

Dalam rangka mengatasi kemiskinan baik secara lokal maupun nasional, pemerintah melaksanakan agenda pemulihan ekonomi sesudah krisis 1997 bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah yang di titik beratkan pada kabupaten/kota. Di harapkan dengan otonomi daerah maka upaya percepatan pembangunan ekonomi atas dasarinisiatif lokal dapat diwujudkan guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Instrumen otonomi daerah yang menonjol adalah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiskal yang mem berikan lebih banyak sumber daya keuangan pada kabupaten/ kota. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sidik, 2005:1). Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah.

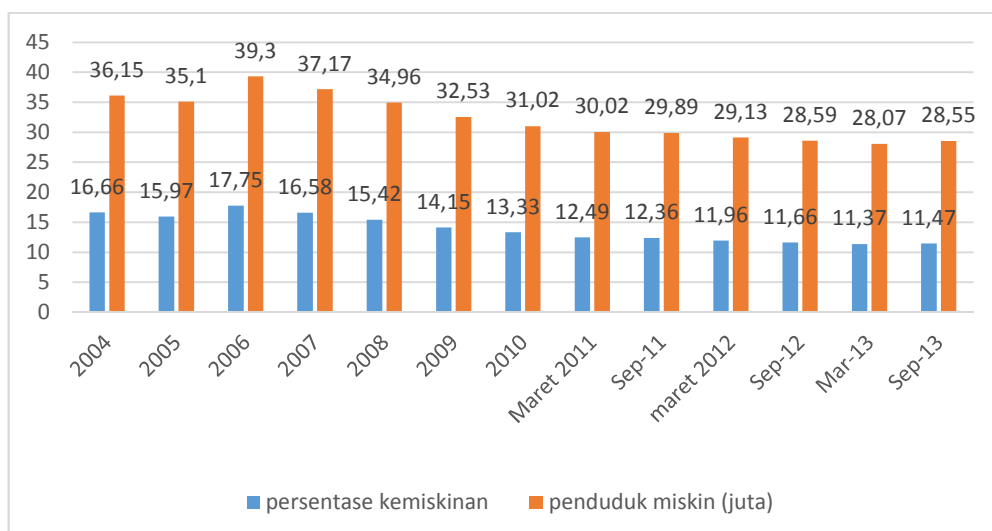
Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (kuncoro, 2006). Pengukuran kemiskinan ini didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarka pada garis konsumsi (*consumption based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minumam dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian

pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minuman dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin, sedangkan elemen kedua sifatnya lebih subyektif.

Secara umum jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia relatif menurun. Pada tahun 2004 ke 2005 jumlah penduduk miskin menurun. Namun pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok pada saat itu mengalami kenaikan yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai pada tahun 2007 samapai 2013 bulan maret jumlah maupun persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2013 bulan september jumlah penduduk maupun persentase jumlah penduduk mengalami kenaikan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 di tunjukan oleh gambar berikut :

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004-2013**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang relatif memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di antara provinsi di Indonesia (Tabel 1.1).

**Tabel 1.1**  
**Peringkat Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi**  
**Tahun 2007**

No	provinsi	2006	2007	selisih peringkat	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28,28	26,65	1,63	6
2	Sumatra Utara	15,01	13,9	1,11	18
3	Sumatra Barat	12,51	11,9	0,61	22
4	Riau	11,85	11,2	0,65	24
5	Jambi	11,37	10,27	1,1	27
6	Sumatra Selatan	20,99	19,15	1,84	14
7	Bengkulu	23	22,13	0,87	10
8	Lampung	22,77	22,19	0,58	9
9	Kepulaun Bangka Belitung	10,91	9,54	1,37	28
10	Kepulaun Riau	12,16	10,3	1,86	26
11	DKI Jakarta	4,47	4,61	-0,04	33
12	Jawa Barat	14,49	13,55	0,94	19
<b>13</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>22,19</b>	<b>20,43</b>	<b>1,76</b>	<b>12</b>
14	DI Yogyakarta	19,15	18,99	0,16	16
15	Jawa Timur	21,09	19,98	1,11	13
16	Banten	9,79	9,07	0,72	30
17	Bali	7,08	6,63	0,45	32
18	Nusa Tenggara Barat	27,17	24,99	2,18	7
19	Nusa tenggara Timur	29,34	27,51	1,83	4
20	Kalimantan Barat	15,24	12,91	2,33	20
21	Kalimantan Tengah	11	9,38	1,62	29
22	Kalimantan Selatan	8,32	7,01	1,31	31
23	Kalimantan Timur	11,41	11,04	0,37	25
24	Sulawesi Utara	11,54	11,42	0,12	23
25	Sulawesi Tengah	23,63	22,42	1,21	8
26	Sulawesi Selatan	14,57	14,11	0,46	17
27	Sulawesi Tenggara	23,37	21,33	2,04	11
28	Gorontalo	29,13	27,35	1,78	5
29	Sulawesi Barat	20,74	19,03	1,71	15
30	Maluku	33,03	31,14	1,89	3
31	Maluku Utara	12,73	11,97	0,76	21
32	Papua Barat	41,34	39,31	2,03	2
33	Papua	41,52	40,78	0,74	1

Sumber: BPS, 2007

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peringkat ke-12 dari 33 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kemiskinan dua (2) tertinggi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi dengan persentase penduduk terendah adalah DKI Jakarta dan Bali. Jawa Tengah dengan urutan 12 menunjukkan adanya fenomena ini bahwa masih tinggi persentase kemiskinan di Jawa mengingat Provinsi Jawa Tengah dengan akses ekonomi di Daerah dengan penduduk miskin terendah yaitu DKI Jakarta dan Bali. Walaupun ada penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 1,76 persen dibandingkan persentase tahun 2006.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 Provinsi Jawa Tengah termasuk peringkat pertama jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa.

**Tabel 1.2**  
**Peringkat Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa, 2007**

Peringkat	Provinsi	Persentase
1	Jawa Tengah	20,43
2	Jawa Timur	19,98
3	DI Yogyakarta	13,55
4	Jawa Barat	18,99
5	DKI Jakarta	4,61

Sumber: BPS, 2007

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah 20,43 persen, angka tersebut cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di Jawa. Sejak era Pelita mulai tahun 1969 propinsi Jawa Tengah berada di antara dua (2) provinsi besar Jawa Barat DKI

Jakarta dan Jawa Timur, yang keduanya maju pesat melalui industrialisasi yang berpusat di Jabotabek dan Surabaya.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata.

Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata. Ditinjau dari faktor penyebab, dapat dipastikan jika kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan.

Sedangkan gambaran umum jumlah penduduk miskin khususnya di Provinsi Jawa Tengah pada bulan maret 2010 sebesar 5,369 jutaorang (16,56 persen), dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2009 yang berjumlah 5,726 juta orang (17,72 persen),berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 356,53 ribu orang. Selama periode bulan maret 2009 – maret 2010, penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah didaerah perkotaan turun 162,00 ribu orang,lebih rendah dibanding di daerah pedesaan turun sebesar 194,53 ribu orang. Di Provinsi Jawa Tengah, selama periode maret 2009 - maret 2010 persentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan maret 2010, sebagian besar 57,93 persen penduduk miskin berada di

pedesaan dan pada bulan maret 2009 sebesar 57,72 persen. Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah maret 2010 sebesar Rp 192.435,- perkapita per bulan. Pengeluaran untuk membiayai makanan sebesar 72,58 persen, sedangkan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) hanya sebesar 27,32 persen.

Jumlah persentase penduduk miskin dan periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun ( tabel 1.3 ). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 2,338 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 6,418 juta orang pada tahun1996 menjadi 8,755 juta orang pada tahun1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 21,61 persen menjadi 28,46 persen pada periode yang sama.

**Tabel 1.3**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Menurut Daerah tahun 1996-2010**

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (Ribuan Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	1,973	4,444	6,418	20,67	20,06	21,61
1999	3,062	5,623	8,755	27,8	28,05	28,46
2002	2,762	4,546	7,308	20,5	24,96	23,06
2003	2,520	4,459	6,980	19,66	23,19	21,78
2004	2,346	4,497	6,843	17,52	23,64	21,11
2005	2,671	3,862	6,533	17,24	23,57	20,49
2006	2,958	4,142	7,100	18,9	25,28	22,19
2007	2,687	3,869	6,577	17,23	23,45	20,43
2008	2,556	3,633	6,189	16,34	21,96	19,23
2009	2,420	3,304	5,725	15,41	19,89	17,72
2010	2,258	3,110	5,369	14,33	18,66	16,56

Sumber : BPS 2010

Pada tahun Periode 2002-2005 jumlah Penduduk Miskin cenderung menurun dari 7,308 juta orang pada tahun 2002 menjadi 6,534 juta orang pada pebruari 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,06 persen pada tahun 2002 menjadi 20,49 persen pada pebruari 2005. Pada tahun 2006, terjadi kenaikan kumlah Penduduk Miskin yaitu dari 6,534 juta orang (20,49 persen) pada bulan pebruari 2005 menjadi 7,101 juta (22,19 persen) pada bulan maret 2006. Penduduk miskin didaerah perkotaan bertambah 0,287 juta orang, sementara di daerah pedesaan bertambah 0,280 juta orang. Peningkatan penduduk miskin di Jawa Tengah dari pebruari 2005 ke maret 2006 disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak pada 1 september 2005, yang kemudian memacu kenaikan harga barang-barang kebutuhan lainnya. Namun pada tahun 2007 sampai 2009, terjadi penurunan jumlah Penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari 7,101 juta orang (22,19 persen) pada bulan maret 2006 turun menjadi 6,190 juta orang (19,23 perse) pada bulan maret 2008, pada periode yang sama, penduduk miskin didaerah perkotaan turun 0,402 juta orang, sementara di daerah pedesaan turun 0,509 juta orang (BPS Jateng, 2010).

Sejalan dengan berfluktuasinya jumlah kemiskinan di Jawa Tengah, ternyata tingkat pengangguran juga secara bersamaan mengalami fluktuatif, dimana jumlah penduduk berusia lima belas tahun keatas, yaitu penduduk termasuk sebagai kelompok usia kerja, pada februari 2010 sebanyak 24.839.061 orang. Dari kelompok usia kerja tersebut sebanyak 17.130.931 orang tergolong dalam angkatan kerja. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja adalah 68,97 persen yang selanjutnya biasa disebut sebagai tingkat partisipasi



angkatan kerja (TPAK). Penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah kelompok orang yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah diterima kerja tapi belum mulai bekerja. Penduduk bekerja pada februari 2010 sebanyak 15.956.034 orang atau 93,14 persen orang dan pengangguran sebanyak 1.174.897 orang atau 6,86 persen. Persentase ini umum dikenal sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sisa dari penduduk usia kerja sebanyak 7.708.130 orang atau sekitar 31,03 persen tergolong sebagai bukan angkatan kerja (BPS Jawa Tengah, 2010).

Bila dibandingkan dengan keadaan agustus 2009, TPAK februari 2010 meningkat sebesar 1,38 persen. Sementara TPT keadaan bulan februari 2010 menurun sebesar 0,42 persen dibandingkan TPT februari 2009 (7,28 persen).

**Tabel 1.4**

**Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan**

		Agustus 2009		Februari 2010	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
angkatan kerja	Bekerja	15.835.382	64,19	15.956.034	64,24
	Pengangguran	1.252.267	5,08	1.174.897	4,73
	<b>Total</b>	<b>17.087.469</b>	<b>69,27</b>	<b>17.130.931</b>	<b>68,97</b>
Bukan angkatan kerja	Sekolah	1.879.303	7,62	1.989.060	8,01
	Mengurus RT	4.271.035	17,31	4.311.058	17,36
	Lainnya	1.431.538	5,8	1.408.012	5,67
	<b>Total</b>	<b>7.581.876</b>	<b>30,73</b>	<b>7.708.130</b>	<b>31,04</b>
<b>Total penduduk 15+</b>		<b>24.669.525</b>	<b>100,00</b>	<b>24.839.061</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2010

Kemudian, bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya agustus 2009, yang mempunyai komposisi 69,27 persen angkatan kerja dan 30,73 persen bukan angkatan kerja, maka keadaan TPAK februari 2010 mengalami penurunan sebesar

0,3 persen. Sedangkan TPT februari 2010 dibandingkan dengan Agustus 2009 mengalami penurunan sebesar 0,47 persen.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang. Tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan. Bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 1997).

Pendidikan juga memberikan pentingnya martabat manusia, mendidik dan memberikan pengetahuan guna untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Hal

tersebut seharusnya menjadi semangat untuk melakukan upaya mencerdaskan bangsa tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri maupun kemandirian. keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak di batasi pada bidang ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 1991-2013”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang dapat diuraikan di atas maka, dapat disimpulkan Rumusan Masalahnya, yaitu Bagaimana pengaruh upah minimum, Pengangguran, tingkat pendidikan, dan Jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 1991-2013, dan bagaimana pengaruh jumlah Kemiskinan tahun sebelumnya terhadap tahun yang sekarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 1991-2013, dan

bagaimana pengaruh jumlah Kemiskinan tahun sebelumnya terhadap tahun yang sekarang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah badan pusat statistik untuk mengambil keputusan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada berbagai pihak, dan kepada masyarakat Jawa Tengah.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Metode Analisis**

##### 1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data diambil dari tahun 1991-2013.

##### 2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi Model Penyesuaian Parsial atau *Partial Adjustment Model* (PAM). Model PAM mengasumsikan keberadaan suatu hubungan *equilibrium* jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi. Dalam jangka pendek, namun demikian yang terjadi adalah *disequilibrium* pada suatu periode dikoreksi pada periode berikutnya.

Berikut merupakan formulasi hubungan jangka panjang model PAM.

$$JKEM_t^* = S_0 + S_1 JPEND_t + S_2 JPENG_t + S_3 UMIN_t + S_4 TPEN_t + U_t$$

Dimana:

$$S_0 = \frac{r_0}{u}, S_1 = \frac{r_1}{u}, S_2 = \frac{r_2}{u}, S_3 = \frac{r_3}{u}, S_4 = \frac{r_4}{u} \dots \dots \dots S_{U_t} = \frac{r_{U_t}}{u}$$

Perilaku penyesuaian parsialnya di formulasikan dengan persamaan sebagai berikut:

$$JKEM_t - JKEM_{t-1} = u (JKEM_t - JKEM_{t-1})$$

Dimana  $u$  adalah koefisien penyesuaian parsial yang memiliki nilai  $0 < u < 1$ ,

$JKEM_t - JKEM_{t-1}$  = penyesuaian aktual,  $(JKEM_t - JKEM_{t-1})$  = penyesuaian yang diinginkan.

Sedangkan formulasi hubungan jangka pendek model PAM adalah sebagai berikut:

$$JKEM_t = r_0 + r_1 JPEND_t + r_2 JPENG_t + r_3 UMIN_t + r_4 TPEN_t + \lambda JKEM_{t-1} + v_t$$

Dimana:  $\lambda = (1 - u)$

Keterangan:

$JKEM_t$  = Tingkat Kemiskinan

$JKEM_{t-1}$  = Tingkat Kemiskinan tahun sebelumnya

$UMIN_t$  = Upah Minimum

$JPEND_t$  = Jumlah Penduduk

$JPENG_t$  = jumlah Pengangguran

$TPEN_t$	= Tingkat Pendidikan
$S_0$	= konstanta
$S_1$	= koefisien jumlah penduduk
$S_2$	= koefisien Jumlah Pengangguran
$S_3$	= koefisien Upah Minimum
$S_4$	= koefisien Tingkat Pendidikan
$u_t$	= Variabel Pengganggu

Persamaan tersebut memodifikasi dari Fumitika Furuoka, 2014; Nicholas M. Odhiambo, 2010; Samuel Antwi, et.al, 2013; dan Algifari, 2012 yang menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM).

#### a. Uji Kebaikan Model

##### 1) Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen (Ghozali, 2006).

##### 2) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi

dalam memperidiksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

#### **b. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)**

Uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa apakah setiap variabel independen dapat memberikan pengaruh kepada variabel dependen.

#### **c. Uji Asumsi Klasik**

##### 1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi penelitian nilai residualnya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Jarque-Bera.

##### 2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya (Hanke dan Reitsch dalam Kuncoro, 2011:118). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Uji White*.

##### 3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2011:125). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Uji Klein* yaitu dengan cara membandingkan koefisien determinasi *auxiliary* dengan koefisien determinasi  $R^2$  model regresi aslinya yaitu Y dengan variabel independen.

##### 4) Uji Otokorelasi

Uji autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Hanke dan Reitsch dalam Koncoro, 2011:115).otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini atau masa datang. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan *Uji Bruesch-Godfrey*.

#### 5) Uji Spesifikasi Model ( Uji *Ramsey-Reset* )

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji asumsi linieritas model, sehingga sering disebut sebagai uji linieritas model. pada penelitian ini akan menggunakan uji *ramsey reset* yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun sebagai berikut, terbagi menjadi lima bagian.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, dan menggambarkan kerangka teori.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**



Metode penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, dan dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian analisis data dan pembahasan.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

daftar pustaka

Lampiran